

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- dkk, J. D. (2001). *Hukum Agraria I*. Jakarta: PT Prenhallindo Jakarta .
- Effendie, B. (1993). *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*. Bandung: Alumni.
- Lubis, M. Y. (2004). *Hukum Pendaftaran Tanah* . Bandung: Mandar Maju.
- Mertokusumo, S. (1988). *Hukum dan Politik Agraria*. Jakarta: Karunika Universitas Terbuka.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Murjiyanto, E. S. (2013). *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.
- Mustafa, B. (1985). *Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Remaja Karya.
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pandjaitan, B. S. (2016). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Medan : CV Manhaji.
- Parangin, E. (1991). *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta : Rajawali Press.
- R.Semiawan, C. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Rahardjo, S. (1986). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung : Angkasa.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rumanti, Y. (2010). *Tesis Hukum : Peranan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah-Sementara Dalam Proses Pendaftaran Tanah di Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara*. Semarang: Undip.
- Sahnan. (2016). *Hukum Agraria Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Santoso, U. (2005). *Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Santoso, U. (2010). *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Santoso, U. (2011). *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media .

- Soemitro, R. H. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Soerodjo, I. (2003). *Kepastian Hukum Atas Tanah Di Indonesia*. Surabaya: Arkola.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung : CV Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta : Pustaka Baru.
- Sumarjono, M. (2008). *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Supriadi. (2006). *Hukum Agraria*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sutedi, A. (2011). *Sertipikat Hak Atas Tanah*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Syarief, E. (2014). *Pensertipikatan Tanah Bekas Hak Eigendom*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta : preadamedia group.

JURNAL

- Atikah, N. (2022). Kedudukan Surat Keterangan Tanah sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia. *Notary Law Journal* , 268.
- Beddu, S. (2013). ANALISIS HUKUM OKUPASI AREAL TANAH HGU PT. BUMI SUMALATA INDAH DI KABUPATEN GORONTALO UTARA. *Jurnal Hukum JUSTITIA* , 108.
- Fina Ayu Safitri, L. T. (2020). Akibat Hukum Penggunaan Sistem Publikasi Negatif Berunsur Positif Dalam Pendaftaran Tanah di Kota Semarang. *Jurnal Notarius*, 790.
- Kesuma, D. A. (2016). Implementasi Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. *Jurnal Ilmu Hukum*, 471.
- Mustarin, B. (2017). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Bersertipikat dan Tidak Bersertipikat. *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 112.
- Panget, A. E. (2013). Penyelesaian Hak Atas Tanah Yang Memiliki Sertipikat Hak Milik Ganda. *Jurnal Lex Administratum*.
- Pieter, H. H. (2022). SANKSI HUKUM MENDIRIKAN BANGUNAN TANPA IZIN DIATAS TANAH HAK MILIK ORANG LAIN. *Jurnal Restorative*

Justice, Vol. 6 No. 2, 183.

Sendow, A. V. (2013). Masalah Pemberian Hak Pengelolaan Atas Tanah Negara di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Hukum UNSRT*, 35.

Sibuea, H. Y. (2011). Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertamakali. *Jurnal Negara Hukum*, 289.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya

INTERNET

Frengky Richard Mesakaraeng. (2018, Maret). Retrieved from Punya Tanah Diserobot Orang Lain? Begini hukumnya:
<https://www.ehukum.com/2018/03/punya-tanah-diserobot-orang-lain.html>

Keuangan, K. (n.d.). *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Retrieved from
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn/manado/bacaartikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>

Patinews.com. (2020, Juli 28). *Sengketa Tanah Letter C, Komisi A DPRD Pati Terima Audiensi WPM*. Retrieved from
<https://www.patinews.com/sengketa-tanah-letter-c-komisi-a-dprd-patiterima-audiensi-wpm/>

LAMPIRAN

1. Surat Izin Riset Penelitian



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Raya Pati-Kudus Km. 3,5 Pati Telp. (0295)381878, 385560
Fax. (0295) 385560, e-mail : bpnpati@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor :1499/ Sket-UP.02.04/VIII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dinar Putri Ramadhani Mulia
NIM : 11000119120170
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Diponegoro Semarang

Telah melaksanakan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati tentang **"Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Sertipikat Tanah yang Tidak Secara Nyata Menguasai Tanah Secara Terus Menerus (Studi Kasus Kelurahan Pati Kidul Kecamatan Pati Kabupaten Pati)"** Dalam rangka melengkapi pembuatan penyusunan Proposal Skripsi / Tugas Akhir

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pati,21 Agustus 2023

An. KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN PATI
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Ditandatangani
secara elektronik

Drs.Muchamad Mastur, SH., M.M
NIP. 196903151994031006

Activate Windows



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN menggunakan sertifikat elektronik BS-E, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

Melalui Profa

Dipindai dengan CamScanner

2. Foto Wawancara

